



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 176/KEP/2007

TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) SEBAGAI
PENANGGUNGJAWAB PENYUSUNAN ANGGARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN RAPBD
TAHUN 2008 SESUAI URUSAN PEMERINTAHAN DAN ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH BARU

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan urusan dan organisasi perangkat daerah;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi azas pengelolaan keuangan daerah maka perlu dilakukan perubahan terhadap KUA, PPA, RASK dan RAPBD Satuan Kerja yang akan menyelenggarakan kegiatan agar berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penunjukan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai Penanggungjawab Penyusunan Anggaran, Program, Kegiatan dan RAPBD Tahun 2008 Sesuai Urusan Pemerintahan dan Organisasi Perangkat Daerah Baru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomer 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomer 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomer 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah (Kabupaten/Kota);

6. Peraturan Pemerintah Nomer 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

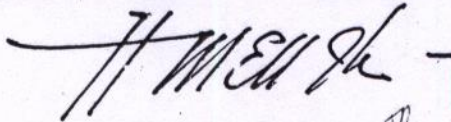
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sebagai Penanggungjawab Penyusunan Anggaran, Program, Kegiatan dan RAPBD Tahun 2008 Sesuai Urusan Pemerintahan dan Organisasi Perangkat Daerah Baru, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lama wajib bertanggungjawab terhadap Anggaran Tahun 2007, Personil dan Aset perangkat lembaga lamanya, selain itu ikut berperan aktif dalam pembahasan-pembahasan di DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta baik mewakili lembaga lama, dipisah, digabung, berganti nama atau Baru , sampai ditetapkannya pejabat yang difinitif.
- KETIGA : Biro umum menetapkan lokasi gedung Perangkat organisasi lama dan baru, serta bertanggungjawab memantau dan mengkoordinasikan terhadap keberadaan aset – aset lembaga lama.
- KEEMPAT : Biro Kepegawaian mempersiapkan penataan personil dengan adanya perubahan organisasi Perangkat Daerah.
- KELIMA : Perangkat Organisasi Daerah yang berubah maupun tetap wajib menyusun KUA,PPAS, RASK dan RAPBD serta DASK Tahun Anggaran 2008 dibawah Koordinasi BAPEDA dan BPKD, sesuai dengan nomenklatur urusan Pemerintahan dan Perangkat Organisasi Daerah yang baru.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai penyusunan Anggaran Tahun 2008 berakhir.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 NOPEMBER 2007

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,


HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Pimpinan DPRD Provinsi DIY;
3. Sekretaris Daerah Provinsi DIY;
4. Semua Kepala SKPD Provinsi DIY.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR : 176/KEP/2007
 TANGGAL 30 NOPEMBER 2007

PENANGGUNGJAWAB PENYUSUN ANGGARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN RAPBD TAHUN 2008

No	PERANGKAT ORGANISASI LAMA	No	PERANGKAT ORGANISASI BARU	PENANGGUNGJAWAB	
				(KEFALA INSTANSI)	KOORDINASI
	2	3.	4	5	6
PERANGKAT ORGANISASI DIPISAH					
1	Dinas Pertanian	1 2	Dinas Pertanian Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	DINAS PERTANIAN	BAPEDA BPKD BIRO ORGANISASI BIRO KEPEGAWAIAN BIRO UMUM
2	Dinas PERINDAGKOP	1 2	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Dinas Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI	BAPEDA BPKD BIRO ORGANISASI BIRO KEPEGAWAIAN BIRO UMUM
3	Badan Perencanaan Daerah	1 2 3	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Biro Administrasi Pembangunan (Bidang Pengendalian Bapeda) Badan Kerjasama, Penanaman Modal dan Perijinan (Kantor Perwakilan Daerah sebagai UPT)	BAPEDA BAPEDA BIRO KERJASAMA	BAPEDA BPKD BIRO ORGANISASI BIRO KEPEGAWAIAN BIRO UMUM
4 5	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Biro Umum	1 2 3	Badan Fengelolaan Keuangan Daerah Biro Umum Biro Pengelolaan Barang Daerah (Bidang Pengelolaan Kekayaan Daerah BPKD dan Bagian Perlengkapan Biro Umum	BPKD BIRO UMUM BIRO UMUM	BAPEDA BPKD BIRO ORGANISASI BIRO KEPEGAWAIAN BIRO UMUM
PERANGKAT ORGANISASI BARU					
1	Tidak ada	1	Biro Administrasi Perekonomian	BAPEDA	BAPEDA BPKD BIRO ORGANISASI BIRO UMUM DINAS PERTANIAN
2	Tidak ada	2	Biro Administrasi Sumberdaya Alam	BAPEDALDA	BAPEDA BPKD BIRO ORGANISASI BIRO KEPEGAWAIAN BIRO UMUM DINAS PERTANIAN DINAS HUTBUN

3	Tidak ada	3	Biro Kesra dan Kemasyarakatan	DINAS SOSIAL	BAPEDA BPKD BIRO ORGANISASI BIRO KEPEGAWAIAN BIRO PEMERINTAHAN BIRO UMUM
---	-----------	---	-------------------------------	--------------	---

PERANGKAT ORGANISASI DIGABUNG

1	Dinas Ketenraman dan Ketertiban Umum	1	Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	DINAS TRANTIBUM	BAPEDA BPKD BIRO ORGANISASI BIRO KEPEGAWAIAN BIRO PEMERINTAHAN BIRO HUKUM BIRO UMUM
---	--------------------------------------	---	---	-----------------	---

2	Badan Informasi Daerah	2	Badan Informasi Daerah	BID	BAPEDA BPKD BIRO ORGANISASI BIRO KEPEGAWAIAN BIRO UMUM
---	------------------------	---	------------------------	-----	--

3	Kantor Pemberdayaan Perempuan	3	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat	KPP	BAPEDA BPKD BIRO ORGANISASI BIRO KEPEGAWAIAN BIRO UMUM
---	-------------------------------	---	---	-----	--

4	Badan Perpustakaan Daerah	4	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	BAPUSDA	BAPEDA BPKD BIRO ORGANISASI BIRO KEPEGAWAIAN KANTOR ARSIP DAERAH BIRO UMUM
---	---------------------------	---	-------------------------------------	---------	---

PERANGKAT ORGANISASI GANTI NAMA

1	Asisten Pemerintahan	1	Asisten Administrasi Umum	BIRO UMUM	BAPEDA BPKD BIRO ORGANISASI BIRO KEPEGAWAIAN BIRO UMUM
2	Asisten Fasilitas dan Investasi	2	Asisten Perekonomian dan Pembangunan		
3	Asisten Pemberdayaan Masyarakat	3	Asisten Pemerintahan dan Kesra		
4	Biro Kepegawaian	4	Badan Kepegawaian Daerah		
5	Badan Pariwisata Daerah	5	Dinas Pariwisata		
6	Badan Pengawas Daerah	6	Inspektorat Propinsi		
7	Dinas Perikanan dan Kelautan	7	Dinas Kelautan dan Perikanan		
8	Dinas KIMPRASWIL	8	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan		

PERANGKAT ORGANISASI TETAP

1 Biro Tata Pemerintahan	1 Biro Tata Pemerintahan	BIRO TATA PEMERINTAHAN	BAPEDA
2 Biro Hukum	2 Biro Hukum	BIRO HUKUM	BPKD
3 Biro Organisasi	3 Biro Organisasi	BIRO ORGANISASI	BIRO ORGANISASI
5 Sekretariat DPRD	5 Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DPRD	BIRO KEPEGAWAIAN
6 Badan Informasi Daerah	6 Badan Informasi Daerah	BADAN INFORMASI DAERAH	BIRO UMUM
7 Badan Pengelola Dampak Lingkungan Daerah	7 Badan Pengelola Dampak Lingkungan Daerah	BADAN PENGELOLAAN DAMPAK LINGKUNGAN	
8 Badan Pendidikan dan Latihan	8 Badan Pendidikan dan Latihan	BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN	
9 Dinas HUTBUN	9 Dinas HUTBUN	DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	
10 Dinas Pendidikan	10 Dinas Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN	
11 Dinas Kebudayaan	11 Dinas Kebudayaan	DINAS KEBUDAYAAN	
12 Dinas Sosial	12 Dinas Sosial	DINAS SOSIAL	
13 Dinas Kesehatan	13 Dinas Kesehatan	DINAS KESEHATAN	
14 Dinas NAKERTRANS	14 Dinas NAKERTRANS	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
15 Dinas Perhubungan	15 Dinas Perhubungan	DINAS PERHUBUNGAN	
16 RS Grhasia	16 RS Grhasia	RS GRHASIA	

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,


HAMENGGU BOWONO X